

THE IMPLEMENTATION OF KESBANGPOL AND KPUD POLITICAL SOCIALIZATION ACTIVITIES IN THE CITY OF PEKANBARU ON BEGINNING VOTERS (WHICH HAS NEW KTP) IN THE 2019 ELECTION

Oleh : M. Irsyad Krisdy

Email: irsyadkrisdy95@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The holding of direct, public, free, secret, honest and fair elections will have a positive impact on strengthening democracy both at the local and national levels. The public is given the right to vote for candidates, as well as political parties whose value individuals will be able to fight for their aspirations if they are elected later in the election. Voters are required to be smart to be able to choose and assess properly and carefully who are the people's representatives who are appropriate and can fight for their aspirations. This means that voters must have a good knowledge of their rights and obligations in the election so that there is a growing awareness of the importance of participating in elections, especially for novice and retired voters. The purpose of this study was to determine and analyze the Comparison of the Socialization of Kesbangpol and KPUD City on Beginner Voters (Newly Having KTP and Retired Officers) in the 2019 Election and its obstacles. This research was conducted with a qualitative type with informants, namely the head of Kesbangpol, the head of the KPUD and novice and retired voters. The results of this research are the Socialization of Kesbangpol and KPUD of Pekanbaru City to Beginner Voters (Those Who Have New KTPs and Retired Officers) In the 2019 Election it has not been optimal and on target which is expected to increase voter participation, especially beginners so that they can give their voting rights for the betterment of the nation. and this Country. The reason for the low participation of first-time voters in Pekanbaru City at the time of the 2019 Mayor and Deputy Mayor Election is the failure of the General Election Commission to function properly. The function of the General Election Commission has not been running properly due to the uneven socialization carried out by the KPU and Kesbangpol Pekanbaru City.

Keywords: Implementation, Socialization, General Election

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon, maupun partai politik yang individu nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya apabila nantinya terpilih dalam pemilu. Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi politik publik serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu Pemilihan yang berkualitas.

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bawaslu, 2009:1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan suatu kegiatan demokrasi yang dinanti banyak orang. Terlepas dari tujuan, apakah ingin menjadicalon atau menjadi tim sukses calon yang akan mencalonkan itu. Pemilihan umum ini diharapkan akan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membantu pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah¹.

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali, jadi untuk menambah wawasan peserta didik proses pemilu diajarkan sejak mereka duduk dibangku sekolah dasar walaupun mereka belum bisa memilih setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan nanti setelah mereka sudah berusia 17 tahun

¹ Purwoko, Bambang, 2003. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah: antara regulasi dan realitas politik", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 191-216

mereka sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga mereka tinggal mempraktekannya. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu ialah warga negara Indonesia, telah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang terkasus pidana. Dalam penyelenggaraan pemilu ada beberapa tahapan yaitu: pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilih masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam menyampaikan hak suara sehingga harus mendapatkan perhatian khusus agar hal ini tidak terjadi pada pemilu berikutnya. Surat suara yang tidak terpakai adalah satunya bentuk bukti terbuangnya secara sia-sia anggaran negara yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Padahal anggaran untuk pengadaan surat suara ini juga tidak murah. Karena akibat pelaksanaan pemilu ini banyak menyedot anggaran pendapatan belanja negara (selanjutnya disebut APBN) yang tadinya dianggarkan untuk pembangunan negara menjadi dialihkan dananya untuk kegiatan pemilu.

Di sinilah dilihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi masyarakat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal. Kesenjangan pendidikan semakin melebar tatkala, orientasi pendidikan itu sendiri masih berfokus pada aspek kognitif, dan masyarakat lebih banyak diperlakukan sebagai obyek pelengkap dalam proses pembelajaran. Apa yang individu

pelajari di kelas terkadang tidak sesuai dengan kehidupan yang individu jalani sebagai anggota masyarakat, padahal individu adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Namun demikian didapati tingkatan hierarki partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (Pemilihan Umum). Semakin tinggi Partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih

rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme, yang lebih mementingkan sisi kepraktisan dibandingkan sisi manfaat. Keadaan ini menarik karena adanya partisipasi positif pemilih pemula terhadap pemilu yang merupakan ajang pendidikan politik yang penting bagi pelajar. Pemilu dapat menjadi bagian pendidikan untuk pencapaian kedewasaan dalam berpolitik dan membangun sikap pribadi yang bertanggung jawab sebagai warga negara. Menurut konsep demokrasi bahwa pemilih pemula juga mendapat peluang dalam kehidupan politik, karena dari sinilah politik yang dapat mengatur negara dapat dibangun. Bagaimanapun, pemilih pemula dapat menjalankan program ini hanya jika dirinya mempunyai kesadaran untuk hidup demokratis. Remaja tidak akan dapat menciptakan suasana demokratis dalam kehidupan politik jika remaja tersebut itu sendiri tidak bersifat demokratis. Secara logikanya, bahwa dalam suatu sistem politik yang demokratis dibutuhkan masyarakat (remaja) yang demokratis juga.

Dijelaskan dia bahwa pemilu 2019 yang dilakukan serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan hari libur, maka siswa diharapkan bisa menggunakan waktunya sebentar untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Karenanya juga meminta siswa untuk mengurus e-KTP sehingga bisa melakukan pencoblosan. Sementara itu panitia menghadirkan pemateri Komisioner KPU Pekanbaru. Mereka membahas tentang pemilu serentak dan teknis-teknis pemilihan atau mencoblosan yang benar. Fenomena yang diperlihatkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi kepada warga Kota Pekanbaru sehingga meningkat partisipasi dalam

memberikan suara pada Tahun 2019, disebabkan oleh fenomena berikut:

1. Adanya sosialisasi yang efektif dari KPU Kota Pekanbaru. KPU Kota Pekanbaru melakukan sejumlah sosialisasi yang rutin menysasar pemilih pemula di sekolah.
2. KPU Pekanbaru juga menggelar Simulasi TPS pada pemilu 2019. Tujuannya memberi arahan seputar prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Simulasi sudah digelar di tingkat kota ataupun tingkat kecamatan.
3. Terjadi kenaikan Partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu indikasinya adalah meningkatnya angka pemilih pemula menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan fenomena yang diperlihatkan oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru pada pemilu tahun 2019 adalah Kesbangpol Kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi pemilihan umum terhadap 750 pemilih pemula yakni siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta se-Kota Pekanbaru, guna menysasar pemilih baru. selama ini tingkat partisipasi khususnya pemilih pemula masih rendah. Sebab para siswa khususnya cenderung cuek dengan politik. Makanya dengan adanya sosialisasi ini, pihaknya ingin memberikan pemahaman agar mereka lebih banyak tahu tentang pemilu dan politik yang akan dilaksanakan mendatang. Selain itu ia juga berharap kepada pemilih pemula, setelah mengikuti acara ini agar menularkan dan memberitahu kepada teman, pihak sekolah, sehingga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesbangpol Dan Kota KPUD Terhadap Pemilih

Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019?

2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Sosialisasi Kesbangpol Dan KPUD Kota Pekanbaru Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sosialisasi Kesbangpol Dan Kota KPUD Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Sosialisasi Kesbangpol Dan Kota KPUD Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019.

Kerangka Teori

Sedangkan menurut Goslin dalam Ihrom sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar serta mengenal norma dan nilai nilai sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan atau perilaku masyarakatnya . Berdasarkan pengertian sosialisasi diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu. Berdasarkan pengertian sosialisasi atau batasan sosialisasi diatas dapat diambil beberapa poin penting yaitu :

1. Sosialisasi berjalan melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya (behavioral patterns of society).
2. Sosialisasi berjalan bertahap dan berkesinambungan (kontinu), mulai dari sejak individu dilahirkan hingga dia mati.
3. Sosialisasi berhubungan erat dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu proses belajar dari seorang individu untuk belajar, mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta cara dia bersikap terhadap sistem adat, bahasa, seni, norma, agama dan seluruh peraturan dan pendirian yang ada dalam lingkungan kebudayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan instansi Kesbangpol Kota Pekanbaru dan KPUD Kota Pekanbaru

Pembahasan

1. **Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesbangpol Dan KPUD Kota Pekanbaru Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019.**

UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau

sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak dapat melepaskan diri dan menghindar dari politik. Oleh karena hakikat manusia termasuk pemuda adalah zoon politicon atau mahluk politik. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda merupakan bagian dari produk politik dan terlibat baik langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu langsung menjadi sangat penting dan strategis disebabkan karena: (1) Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi ke arah yang lebih substantif yakni terlaksananya pemilu secara free dan fair, (2) Untuk mengawal proses tersebut, pemuda dapat berkiprah baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun pengawas proses penyelenggaraan pemilu, (3) Pemuda harus dapat tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, (4) Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik.

Jumlah pemilih pemula di Pekanbaru adalah 20% dari seluruh pemilih, maka dengan itu pemilih pemula sangatlah besar dan akan ikut berpengaruh banyak terhadap hasil kebijakan politik dan lain sebagainya. Meskipun pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada pemilu, perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang dan cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya

dalam pemilihan umum. Kurangnya pemahaman terhadap arti pentingnya demokrasi yang sedang kita anut dan kita jalankan saat ini yaitu pesta demokrasi.

Secara psikologis tentu banyak hal yang mendasari mengapa seorang pemilih pemula untuk tidak memilih atau golput. Perilaku tidak memilih dapat disebabkan oleh orientasi perilaku pemilih pemula yang memiliki karakteristik berikut:

- a) Apatitis, artinya tidak adanya minat terhadap persoalan politik karena rendahnya sosialisasi politik.
- b) Anomi, artinya muncul perasaan tidak berguna (powerless) dan memandang aktifitas politik sebagai sesuatu yang tidak berguna.
- c) Aliensi, artinya adanya perasaan asing yang melihat seolah pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap hidupnya.

Berdasarkan dari karakteristik diatas, sudah menjadi sebuah bukti bahwa partisipasi politik dalam pemilihan pemula rendah. Banyaknya pemilih pemula yang golput atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sudah menjadi sebuah indikasi bahwa pemilih pemula yang juga anggota dalam masyarakat sudah banyak yang mulai tidak percaya kepada pemerintah dan terhadap proses pemilu yang dirasa tidak jujur dan tidak adil serta tidak akan membawa perubahan pada kondisi yang lebih baik.

1.1 Sosialisasi KPU Kota Pekanbaru

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan sosialisasi dimaksud dalam peraturan ini dengan tetap berpedoman dua belas asas penyelenggara yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dan bertujuan; menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dan meningkatkan partisipasi pemilih.

KPU Kota Pekanbaru gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula., misalnya sasarannya peserta didik di SMAN 3 Pekanbaru. Telah diterangkan mulai dari jumlah surat suara ada lima lembar, setiap lembar kertas suarat suara memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya saat melakukan pencoblosan, cobloslah ditengah-tengah gambar foto untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPD. Sementara untuk calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak ada gambar foto. Yang ada hanya nomor partai, logo partai dan nama Caleg. Maka coblos ditengah-tengah nomor, logo atau Calegnya, jangan sampai kena garis pembatas. Jika kena garis, suara itu akan hangus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sosialisasi pendidikan pemilih pemula di SMA Annur, Kelurahan Sumahilang Kecamatan

Pekanbaru Kota. Ketua Divisi Data KPU Kota Pekanbaru, Abdul Razak JER dalam kesempatan itu mengajak kepada siswa siswi SMA Annur Pekanbaru, untuk menjadikan momen sebagai pemilih pemula, jadi sejarah hidup nan berkesan. Meski masih dibangku sekolah, tetapi berumur 17 tahun, maka sudah bisa ikut menjadi pemilih pada Pemilihan Umum, pada Rabu 17 April 2019.

Pemilih pemula atau yang dikenal dengan kalangan milineal, merupakan pemilih yang sedang beranjak dari remaja menjadi dewasa. Pada umumnya, para pelajar masih enggan untuk ikut memilih di TPS, Karena tidak mengerti bagaimana tata cara pemilihan di kotak suara. Untuk itulah menurutnya KPU Pekanbaru saat ini gencar melakukan sosialisasi kepada kalangan milineal. Agar pemilih pemula ini bisa sadar memilih untuk memberikan hak suaranya di TPS.

1.2 Sosialisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi pemilihan umum terhadap 750 pemilih pemula yakni siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta se-Kota Pekanbaru, guna menyasar pemilih baru. selama ini tingkat partisipasi khususnya pemilih pemula masih rendah. Sebab para siswa khususnya cenderung cuek dengan politik. Makanya dengan adanya sosialisasi ini, pihaknya ingin memberikan pemahaman agar mereka lebih banyak tahu tentang pemilu dan politik yang akan dilaksanakan mendatang. Selain itu ia juga berharap kepada pemilih pemula, setelah mengikuti acara ini agar menularkan dan memberitahu kepada

teman, pihak sekolah, sehingga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Demi meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan tokoh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol di Hotel Ayola Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2020, peserta yang hadir ke acara sosialisasi ini jumlahnya mencapai 160 orang siswa dan siswi SMA sederajat se-kota Pekanbaru. Guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, Kesbangpol Kota Pekanbaru menggelar penyuluhan kepada siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta di kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

Kesbangpol Kota Pekanbaru menggelar kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang politik guna meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu serentak tahun 2019. Kegiatan diikuti masyarakat, organisasi masyarakat dan kepemudaan. Acara itu digelar di aula Kantor Camat Lima Puluh selama satu hari, yang diisi dengan pemaparan sejumlah materi dari 3 orang narasumber, dan sesi tanya-jawab yang dibuka kepada peserta yang hadir.

Tujuan dari acara ini adalah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pengetahuan politik bagi masyarakat. Sementara, Kesbangpol Kota Pekanbaru mengundang narasumber Sekretaris Badan Kesbangpol Pekanbaru Maisisco, Ketua KPU Pekanbaru Yelli Noviza, Anggota Bawaslu Pekanbaru Rizqi Abadi dan dihadiri Sekcam Lima Puluh. Selain itu acara ini juga bertujuan agar para peserta yang mengikuti penyuluhan dapat menyampaikan kepada masyarakat luas apa yang sudah didapat

dari penyuluhan tersebut. Sehingga pada penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislative mendatang dapat berjalan aman damai dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru secara marathon telah melaksanakan sosialisasi terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta se-Kota Pekanbaru. Pada hari terakhir dilaksanakan di Pihak Kesbangpol Kota Pekanbaru diharapkan siswa untuk mengurus e-KTP sehingga bisa melakukan pencoblosan. Pemilu 2019 dilakukan serentak, DPR RI, DPD RI, DPRD kota/kabupaten dan Presiden. Tanggal 17 April 2019 hari libur, siswa diharapkan gunakan waktunya barang sebentar untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Maka itu diharapkan kepada pemilih pemula, apa yang didapat dari penyuluhan ini menjadi ilmu pengetahuan dan disampaikan siswa ke yang lain. Sehingga nantinya, siswa yang lain juga bisa memahami tentang pemilu, sehingga mereka memberikan hak suara dalam memilih dalam pemilu nantinya. Sebab dengan adanya sosialisasi ini, maka para siswa dan siswi yang ikut akan bisa memberikan hak pilihnya.

Pada sosialisasi terakhir yang dilakukan ini sebanyak 16 SLTA sederajat di Kecamatan Tampan hadir didampingi guru. Adapun sekolah SLTA itu antara lain, SMKN 4, SMAN 4, SMA Babusalam, SMA Muhammadiyah, SMK Taruna Satria, SMA 15. Selain itu, SMK Kehutanan, SMK Farmasi Ekasari, Dar-Elhikma, SMK Taruna, SMAN 12 serta SMA 10. Sementara itu, penerjemah dihadirkan, Komisioner KPU Pekanbaru dengan materi pemilu 2019 dan teknis-teknis pemilihan atau mencoblosan yang benar. Menjelang

acara selesai para siswa dan siswi antusias melakukan tanya jawab dan diskusi seputar pemilu.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Sosialisasi Kesbangpol Dan KPUD Kota Pekanbaru Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru juga mengalami beberapa hambatan yang terjadi dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru jika dilihat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Masalah pendataan, pendataan tidak ditangani oleh yang berkompeten dalam data statistik. Pendataan dilakukan oleh RT/RW didaerah setempat, sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahandalam mendata pemilih.
2. Terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah pusat menjadi penghalang langkah KPU kota Pekanbaru untuk membuat program-program sosialisasi ke pemilih pemula.
3. Mengingat banyaknya segmentasi para pemilih pemula yang akan disentuh, kendala disini adalah keterbatasan personil, begitu banyaknya segmentasi pemilih pemula yang akan disentuh tidak diikuti oleh banyaknya personil dalam menjalankan sosialisasi, kendala ini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan program-program.

Sosialisasi oleh KPU Kota Pekanbaru juga mendapatkan beberapa faktor pendukung yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 yaitu antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan

sosialisasi dan datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, sosialisasi yang diberikan partai politik, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, serta adanya kerjasama dengan lembaga/pemerintah, TNI, dan Polri untuk mensukseskan pemilu tahun 2019.

Kesbangpol Kota Pekanbaru juga mendapatkan banyak faktor pendukung dalam sosialisasi pemilu 2019 terhadap pemilih pemula yang dapat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu nanti. Pertama yang dipilih itu bukan hanya Presiden saja, tapi disitu ada lima surat suara. Diantaranya, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Kedua, upaya-upaya yang telah dilakukannya bersama Komisi Pemilihan Umum dalam hal sosialisasi dan penyuluhan tentang kepemiluan berjalan dengan selaras sesuai dengan tujuan.

Kesimpulan

1. Sosialisasi Kesbangpol Dan KPUD Kota Pekanbaru Terhadap Pemilih Pemula (Yang Baru Memiliki KTP) Pada Pemilu 2019 dilakukan secara optimal dan tepat sasaran yang mana diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih terutama pemula agar dapat memberikan hak suaranya demi kemajuan bangsa dan Negara ini.
2. KPU Kota Pekanbaru dan Kesbangpol Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya dalam dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan bisa dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum 2019. Peran yang telah dilakukan KPU Kota Pekanbaru

dan Kesbangpol Kota Pekanbaru yaitu sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik, melakukan koordinasi dengan pihak SMA/SMK Negeri dan Swasta di Pekanbaru, dan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu di penyuluhan yang diadakan serta media massa dan media elektronik. KPU Kota Pekanbaru dan Kesbangpol Kota Pekanbaru juga telah memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dengan melakukan mobilisasi sosial, memanfaatkan jejaring sosial.

Saran

1. Pemilih pemula harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan politik dan pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat lokal maupun tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta tokoh masyarakat melalui pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula dapat meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam dunia politik.
2. KPU Kota Pekanbaru dan Kesbangpol Kota Pekanbaru seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam dunia politik, serta pemberian pendidikan politik yang ditujukan khusus untuk pemilih pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam

pengambilan data, peneliti merasakan kurangnya data yang peneliti dapatkan dalam skripsi ini dikarenakan tidak adanya rekapan data lengkap dari KPU Kota Pekanbaru dan Kesbangpol Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara Pemilu.

Daftar Pustaka

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Damsar, 2015, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Prenada Media.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kamanto. Sunarto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purwoko, Bambang, 2003. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah: antara regulasi dan realitas politik" , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto*, Soerjono, 1993, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.

Rujukan Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD
Undang Nomor 15 Tahun 2011 (selanjutnya ditulis UU 15/2011) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 (selanjutnya ditulis UU 8/2012) tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 tentang Pemilihan Pemula
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemilihan umum.

Jurnal

Rafika Julia. (2014). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum 2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, hlm 5.

Djuyanto, Yusa. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. HUMANIORA Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212

Ngongoloy, Meytisen Hendra. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, hlm 6.

Sumber Website

https://kesbangpol-pekanbaru.org/beranda/baca_berita/29